



WALI Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika membesuk korban penikaman di RSAS, Kamis (26/8/2026).

ISTRI DITIKAM SUAMI

Adhan: Sangat Tidak Manusiawi

GORONTALO - Usai melakukan agenda pemerintahan di Manado, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea langsung menuju ke Rumah Sakit Aloeie Saboe (RSAS) Kota Gorontalo, Kamis (26/8) kemarin.

Kedatangan Adhan di salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah itu, bukan untuk inspeksi mendadak (Sidak), melainkan menyambangi SM, yang sedang mendapat perawatan intensif rumah sakit, lantaran menjadi korban penikaman yang dilakukan suaminya sendiri, FM (26), di sebuah indekos di Jalan Kasuari,



DISWAY

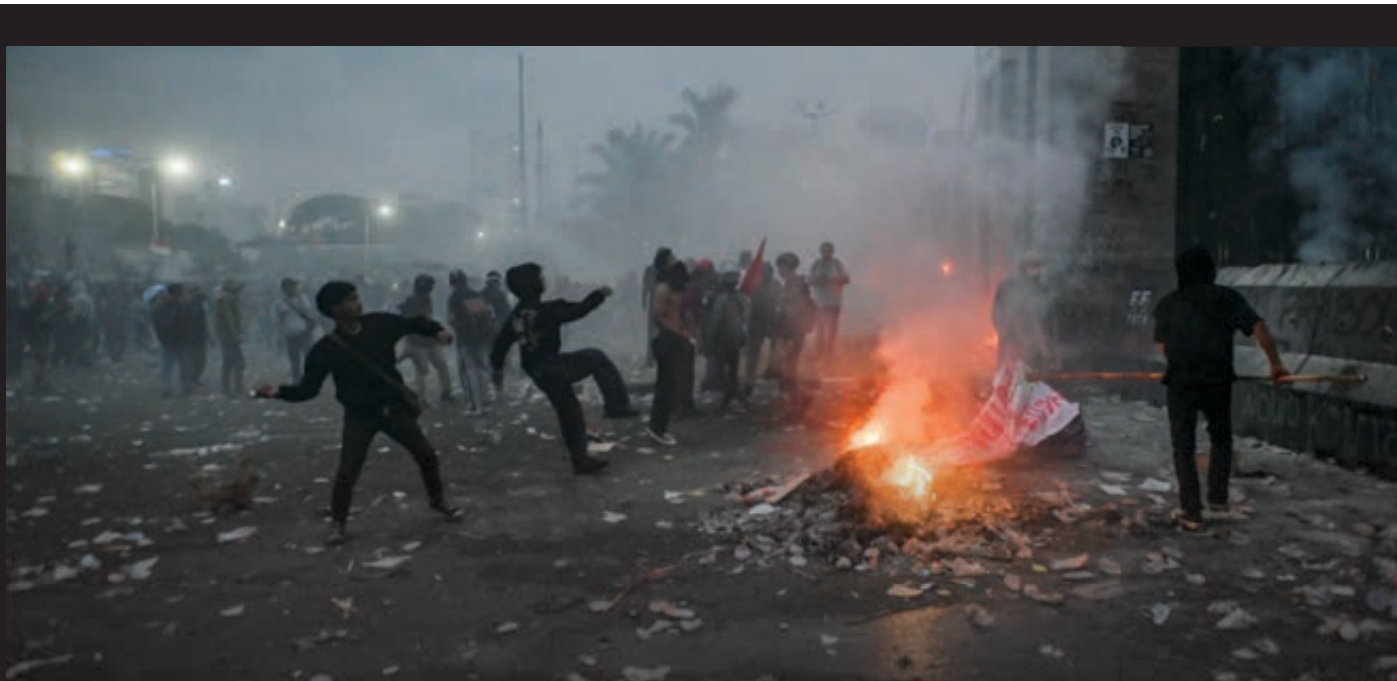
Oleh: Dahlan Iskan



Hakka Ngiau

SAYA satu panggung dengan Ahok kemarin. Di museum suku Hakka di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Ada juga Teuku Azmi Abubakar di situ: tokoh Aceh yang punya pustaka Tionghoa Peranakan di Banten. Ia alumnus teknik sipil Institut Teknologi Indonesia, Tangerang. Ia membangun gedung dua lantai untuk berbagai dokumen, buku, dan artefak Tionghoa Peranakan.



ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A/FOC. MASSA menggelar aksi di depan kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut menuntut pemberantasan korupsi dan serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

DEMO 27 AGUSTUS

BERUJUNG BENTROK, JAKARTA MENCEKAM

JAKARTA -GP- Demo 27 Agustus yang salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta berujung bentrok, Kamis (27/8) malam. Bentrok antara aparat kepolisian dengan massa demonstran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Aksi bentrok mengakibatkan beberapa demonstran mengalami bocor di bagian kepala. Massa dan pihak kepolisian sempat terlibat aksi saling lempar batu.

■ Bersambung ke Hal.2

UU PERAMPASAN ASSET

15 Desember Tak Beres Dasco Cs Mundur

JAKARTA - Empat pimpinan DPR mempertaruhkan jabatan dan kursi parlemen jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tak juga diselesaikan hingga 15 Desember 2026. Mereka menekan surat pernyataan kesanggupan mundur setelah didesak massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Kamis (27/8). Empat pimpinan DPR yang menandatangani pernyataan itu yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yulianti.

■ Bersambung ke Hal.2



PIMPINAN DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menandatangani pernyataan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tak beres sebelum 15 Desember 2026.

PEMPROV GORONTALO DAN KEJATI GORONTALO TEKEN NOTA KESEPAKATAN OPTIMALISASI PAD Perkuat Sinergi Menuju Kemandirian Fiskal Daerah

(FOTO: HARIS/ DISKOMINFOTIK) GUBERNUR Gorontalo Gusnar Ismail (kiri) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Sumurung P. Simaremare memperlihatkan nota kerja sama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (27/8).



GUBERNUR Gorontalo Gusnar Ismail, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Sumurung P. Simaremare menandatangani nota kesepakatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (27/8/2026). Penandatanganan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemprov dan Kejati Gorontalo dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah termasuk optimalisasi PAD.

GUBERNUR Gusnar Ismail dalam sambutannya mengatakan bahwa PAD adalah salah satu substansi dari otonomi daerah. Ia mengungkapkan, APBD Provinsi Gorontalo tahun ini yang hanya sekitar Rp1,5 triliun, dimana Rp 450 miliar diantaranya adalah PAD. "Kalau ini kita kaitkan dengan otonomi, daerah ini belum otonomi, masih terus kita mengharapakan kucuran dana dari pusat. Oleh karena itu kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi

untuk mendorong PAD itu supaya bergerak naik, paling tidak kita berupaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah," tegas Gusnar.

Gubernur Gusnar berharap penandatanganan nota kesepakatan ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD. Nantinya kesepakatan tersebut akan dikembangkan pada penanganan program-program strategis

■ Bersambung ke Hal.2

Berujung Bentrok, Jakarta Mencekam

dari halaman 1

Massa juga terlihat mengejar aparat kepolisian dan menembaki dengan petasan. Petugas kepolisian juga menembaki massa aksi dengan gas air mata. “Minggir, kasih jalan,” kata pemotor yang membawa korban luka luka di kepala di samping gedung BPK. Sementara itu, di kawasan Pejompongan konsentrasi massa yang didominasi (tampak seperti) siswa STM bertahan di kolong jembatan dan di pertigaan gedung BPK. Pantauan arus lalu lintas di ruas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota ditutup total imbas bentrokan. Salah satu lokasi bentrok berada di wilayah Petamburan. Di lokasi itu, massa aksi berhamburan dari flyover Jalan Gatot Subroto menuju Halte Petamburan. Massa kocar-kacir setelah petugas meminta mereka membubarkan diri. Di tengah situasi tersebut, gas air mata meletup hingga mengudara di sekitar lokasi. Sejumlah peserta aksi berlari menjauh dari titik kerumunan untuk menghindari kepanasan gas air mata. Sekitar pukul 22.00 WIB, suasana di depan Halte Petamburan masih ramai. Bukan oleh antrean penumpang yang menunggu Transjakarta, melainkan massa aksi yang masih berkerumun di sekitar lokasi. Tidak ada atribut mahasiswa atau baju pelajar di sekitar lokasi, massa

aksi yang terlihat rata-rata mengenakan pakaian berwarna hitam. Beberapa di antaranya memilih berdiri di pinggir jalan sambil mengamati situasi. Sebagian lainnya masih bergerak menjauh dari arah flyover. Kepulan gas air mata yang sebelumnya memenuhi sekitar titik pembubaran perlahan menipis. Namun, suasana belum sepenuhnya tenang. Arus orang yang bergerak menjauh dari titik aksi sesekali terlihat memenuhi sisi jalan. Mereka berjalan cepat, sebagian menutup hidung dan mulut untuk menghindari sisa gas yang masih terasa di udara. Situasi di sekitar Halte Petamburan pun menjadi saksi bubaranya massa aksi pada malam ini.

TUNTUTAN DEMO

Demo yang berlangsung 27 Agustus 2026 berlangsung di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu pusat aksi berada di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, yang diikuti berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa dengan tuntutan yang berbeda. Setidaknya terdapat empat kelompok yang menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Aksi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah elemen masyarakat

telah mempersiapkan mobilisasi sejak beberapa hari sebelumnya. Selain menyampaikan aspirasi terkait persoalan korupsi dan kebijakan pemerintah, massa juga membawa sejumlah tuntutan sosial dan ekonomi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dipimpin oleh Koordinator AMPB Supriyono alias Botok dan berfokus pada tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemberantasan korupsi.

Kehadiran berbagai kelompok membuat isu yang dibawa dalam aksi cukup beragam. Namun, AMPB menjadi salah satu penggerak utama yang sejak awal mengumumkan dan mempersiapkan aksi 27 Agustus, sebelum kemudian sejumlah elemen masyarakat lain menyatakan akan bergabung. Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda. Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut berkaitan dengan pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, serta evaluasi sejumlah program pemerintah. Dilansir Suara.com, tuntutan tersebut dibawa oleh sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI.

65 ORANG DIAMANKAN, DUA JADI TERSANGKA

Polda Metro Jaya mengamankan total 65 orang

dalam rangkaian tindakan pencegahan menjelang aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan puluhan orang tersebut diamankan oleh dua direktorat, yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

“Total 65 orang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan dua orang oleh Direktorat Siber,” katanya kepada awak media, Kamis 27 Agustus 2026.

Dia mengungkapkan, dari 65 orang yang diamankan, dua orang yang ditangani Direktorat Siber telah dilakukan penahanan. Kedua orang tersebut masing-masing berinisial R dan Z. “Yang dua oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan, yaitu dengan inisial R dan Z,” ungkapnya. Sementara itu, terhadap 63 orang yang diamankan Ditreskrimum, proses pemeriksaan dan pendalaman masih dilakukan penyidik.

SementaraDirektur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin menjelaskan tindakan kepolisian tersebut merupakan bagian dari preventive strike untuk mencegah adanya pihak yang diduga hendak menunggangi aksi penyampaian pendapat.

Polisi menyebut telah menemukan dugaan konsolidasi, mobilisasi massa, penggalangan dana, penyebaran narasi melalui media sosial, hingga persiapan sejumlah sarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan dan mengganggu keamanan umum.

Dalam penindakan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 39 senjata tajam, dua airsoft gun, tujuh jeriken bahan bakar bensin, 201 botol kaca berikut sumbu, tiga stik golf, serta sejumlah barang lainnya. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk dugaan pihak yang terlibat dalam perekrutan, pembiayaan, penyediaan sarana, pengorganisasian massa, maupun pemberi perintah.

Polda Metro Jaya menegaskan tindakan tersebut tidak ditujukan untuk menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Kepolisian menyatakan tetap menjamin penyampaian aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. (jpnnet/diswaynet)

Perkuat...

dari halaman 1

yang melibatkan kepentingan rakyat dan anggaran yang cukup besar. “Saya harapkan kesepakatan ini segera ditindaklanjuti agar kita bisa segera melangkah bersama dengan tujuan mendorong terwujudnya kemandirian fiskal dan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu Kajati Sumurung P. Simaremare mengatakan, Kejaksaan Tinggi Gorontalo berkomitmen hadir sebagai mitra strategis Pemprov Gorontalo dengan tetap menjaga profesionalitas, independensi, integritas, serta batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Menurutnya, pendekatan preventif melalui pemberian pendapat dan pertimbangan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sepanjang seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perlu kami tegaskan bahwa pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan bukan dimaksudkan untuk membenarkan setiap kebijakan pemerintah daerah, melainkan untuk memastikan agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan memiliki landasan hukum yang kuat. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kecepatan pembangunan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” pungkas Kajati Gorontalo. (tro*)



Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan GORONTALO ISLAMIC CENTRE DI BANK MUAMALAT NO REK : 8120999999

LAPORAN KEUANGAN MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 9 Januari 2026	
Bank Muamalat	Rp 3.248.580.793
Bank BSG	Rp 372.045.645
Total Saldo	Rp 3.620.626.438
Total Pertambahan Saldo setelah dikurangi pengeluaran selang 30 Mei s/d 12 Juni 2026	
	Rp 106.454.766

Adhan: Sangat Tidak Manusiawi

dari halaman 1

Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur pada Sabtu (22/8) lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi SM sekaligus menyampaikan keprihatinan atas tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adhan mengecam keras tindakan FM. Menurutnya, persoalan keluarga semestinya diselesaikan melalui komunikasi dan mencari jalan keluar bersama, bukan menggunakan kekerasan yang dapat mengancam

keselamatan pasangan. “Saya tidak mau masuk ke intern keluarga. Hanya saja, kalau ada masalah, cari solusi, bukan main tusuk seperti ini,” tegas Adhan.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami korban. Terlebih, SM disebut mengalami 17 luka tusukan akibat aksi tersebut. Adhan menilai, jika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, persoalan seharusnya diselesaikan secara baik-baik tanpa mengedepankan emosi. “Kalau tidak mampu mengurus lagi, kembalikan ke orang tua. Ini kejadian yang sangat luar biasa,

korban mengalami 17 tusukan,” ujarnya. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya para pria, agar mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Menurutnya, kekerasan bukan jalan keluar dalam menyelesaikan konflik keluarga. Adhan berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Kota Gorontalo. Ia mengajak masyarakat mengedepankan komunikasi, menahan diri, serta mencari solusi setiap kali menghadapi persoalan dalam keluarga. “Saya harap tidak ada lagi kejadian semacam ini,” tandasnya. (rwf)

15 Desember Tak Beres Dasco Cs Mundur

dari halaman 1

Kesepakatan tersebut lahir dalam audiensi antara pimpinan DPR dan massa AMPB di kompleks parlemen, Jakarta, saat rapat paripurna DPR tengah berlangsung. Dalam dokumen hasil audiensi, DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Semula, komitmen mundur yang dicantumkan dalam surat hanya menyasar jabatan pimpinan DPR. Artinya, jika target legislasi gagal dicapai, pimpinan yang bersangkutan tetap berstatus anggota DPR. Massa AMPB menolak rumusan tersebut. “Kalau mundur dari pimpinan berarti masih jadi anggota DPR,” ujar salah seorang peserta audiensi. Desakan itu kemudian mengubah isi kesepakatan. Dasco menerima permintaan massa dan menambahkan klausul secara tulisan tangan agar pengunduran

diri tidak hanya dari kursi pimpinan DPR, tetapi juga dari keanggotaan DPR. Setelah klausul tersebut ditambahkan, Dasco menandatangani dokumen itu. Tiga pimpinan DPR lainnya kemudian mengikuti dengan meneken surat pernyataan yang sama. Dengan demikian, tenggat 15 Desember kini menjadi batas yang dipertaruhkan empat pimpinan DPR. Jika RUU Perampasan Aset tak selesai hingga tanggal tersebut, mereka menyatakan siap kehilangan bukan hanya posisi di pimpinan parlemen, tetapi juga kursi sebagai anggota DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan pada 15 Desember 2026. “Itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat Paripurna ada risalah, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-

Hakka Ngiau

dari halaman 1

Setiap Agustus suku Hakka memang mengadakan seminar kebangsaan di situ. Kali ini bersama warga Yap Indonesia yang diketuai oleh Haryanto Yap. Anda sudah tahu: setiap orang Tionghoa punya dua identitas. Identitas suku dan identitas marga. Misalkan Anda suku Hakka, atau Tiuchu, atau Hokkian, Guangshao, Manchu, dan seterusnya. Di setiap warga suku itu marganya berbeda-beda. Di suku Hakka ada yang bermarga Chen (Tan). Di suku Hokkian juga ada yang bermarga Chen. Semua suku punya semua marga. Semua marga ada di semua suku.

Ketua suku Hakka di Indonesia, Sugeng Prananto adalah juga ketua marga Yap Indonesia. Haryanto tadi ketua hariannya.

Masing-masing suku juga punya lagu resminya sendiri-sendiri. Pun semua marga. Di forum kemarin, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diputar juga lagu suku Hakka. Lalu diputar pula lagu “kebangsaan” marga Yap. Lain kali kalau penyelenggaranya marga Huang diputar lagu resmi marga Huang –yang di Indonesia ditulis sebagai marga Oei. Malu: baru sekali ini saya ke Museum Hakka. Dulunya, ketika Presiden SBY meresmikannya, saya tidak bisa ikut serta. Beberapa kali diundang ke acara di situ selalu berhalangan.

Museum Hakka ini (disebut juga suku Khek atau Kejia) ternyata bagus sekali. Lokasinya tidak jauh dari gedung teater Keong Emas dan anjungan Sulawesi Tenggara. Bentuk bangunan museum ini dibuat mirip rumah besar tradisional suku Hakka di masa lalu: satu rumah besar untuk banyak keluarga.

Tembok luar rumah besar itu melingkar. Bulat. Tinggi. Setinggi rumah tiga lantai. Pintu masuknya hanya satu: pintu gerbangnya. Puluhan rumah tangga berada dalam satu rumah besar.

Semua kamar/rumah menghadap ke dalam: ke halaman luas yang bentuknya bulat –mengikuti bentuk luarnya. Halaman itu menjadi halaman bersama. Ada yang tinggal di lantai dua atau tiga. Lantai pertamanya untuk ternak dan logistik. Bentuk museum ini dibuat sangat mirip dengan itu. Tiap kamarnya, di tiga lantai, difungsikan sebagai

museum. Halamannya difungsikan untuk ruangan besar melingkar. Bisa untuk 1000 orang. Di situ lah seminar kebangsaan kemarin berlangsung. Bedanya, di museum ini “halaman” tengahnya beratap. Sedang di rumah besar yang asli atapnya langit dan kadang mendung.

Kini, di daerah asal suku Hakka di Tiongkok tidak ada lagi orang yang tinggal di rumah besar seperti itu. Beberapa rumah besar peninggalan masa lalu masih ada. Sudah sangat tua. Dijadikan objek wisata.

Saya pernah mengunjungi rumah besar yang masih asli di sana: di kabupaten Mexian, bagian utara provinsi Guangdong. Sudah terlihat kusam kuno. Ketika naik tangga ke lantai atas muncul rasa khawatir: tangga kayunya seperti lapuk.

Setiap kali ke Meixian saya tidur di Meizhou, kota terbesarnya. Di kunjungan ketiga tahun lalu Meizhou sudah berubah total: menjadi sangat 靓女 –ciang ngi, cantik dalam bahasa Hakka. Piao liang dalam bahasa Mandarin. Di kunjungan ketiga itu saya juga ke Sunkou –pelabuhan sungai yang hampir semua orang Hakka perantauan mengenangnya. Dari tepi sungai itulah orang-orang Hakka berangkat meninggalkan kampung halaman menuju Nan Yang –laut selatan. Itu bisa berarti, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, atau Indonesia.

Di daerah baru itu mereka menyatu dan jadi tokoh setempat: Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew adalah orang Hakka. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga orang Hakka. Pun Presiden Filipina Corazon Aquino.

Siapa tahu kelak Ahok, orang Hakka dari Belitung juga akan jadi seperti Lee Kuan Yew untuk Indonesia.

Itu tidak mustahil –kalau Tuhan sudah menakdirkan begitu. Anda sudah tahu: untuk pilpres akan datang tidak perlu lagi batas minimal perolehan suara partai.

PDI-Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri. Partai itu tidak punya banyak pilihan. Ahok bisa dimajukan. Kalau perlu dipasangkan dengan Mahfud MD. Atau sebaliknya. Mereka bisa terpilih. Orang sudah muak dengan korupsi. Ahok-Mahfud bisa jadi pilihan. Atau tidak.

“Itu tidak mungkin,” ujar Ahok ketika kemungkinan



GRAND VITARA

Berkelas di Setiap Perjalanan

Rasakan Kemewahan dan Efisiensi Terdepan di Setiap Pencapaian Anda.

YOUR GEAR

FREEDOM PROMO

Dapatkan Promo Spesial Sekarang



iPhone 17 Pro Max

DP Motor

25%

Dengan Cicilan Ringan

SCAN HERE

QR Code 1

QR Code 2

Syarat dan Ketentuan Berlaku

GKK 2026 Libatkan 175 UMKM

Gusnar Tak Mau Karawo Cuma Jadi Hiasan di Karnaval

GORONTALO - Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2026 tak ingin mengulang persoalan tahun sebelumnya. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta identitas karawo benar-benar menjadi wajah utama karnaval, bukan sekadar tempelan yang hanya terlihat di bagian-bagian tertentu kostum peserta. Gusnar bahkan meminta 70 persen unsur karawo ditempatkan di bagian depan kostum agar langsung terlihat saat peserta melintas di hadapan penonton. “70 persen karawo di bagian depan,

jangan di belakang. Karena kesan kemarin, mungkin karena pertama kali saya melihat juga, mana bagian karawonya. Hanya di spot-spot tertentu saja,” kata Gusnar dalam rapat persiapan GKK 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (26/8). Penegasan itu menjadi salah satu titik penting persiapan GKK 2026 yang akan digelar 11-13 September. Tahun ini, pemerintah provinsi menargetkan karnaval tidak hanya menjadi panggung pertunjukan, tetapi sekaligus etalase terbesar untuk menunjukkan identitas kain tradisional Gorontalo. Skalanya pun cukup besar. Sedikitnya 175 pelaku UMKM dan 500 siswa akan terlibat dalam rangkaian kegiatan. Peserta dari luar

daerah juga mulai berdatangan. Salah satunya kontingen Bali yang disebut telah mendaftar sekitar 100 orang. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menyampaikan kesiapan tersebut dalam rapat yang dipimpin Gusnar, didampingi Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekdaprov Sofian Ibrahim. Selain karnaval, rangkaian GKK akan diisi sejumlah agenda, termasuk Jelajah Rasa Nusantara di halaman parkir GPCC dengan 50 stan kuliner dan bazar yang melibatkan sekitar 175 UMKM. Ada pula Karawo Kolosal yang melibatkan 500 siswa.

Mereka akan menjalani proses pembuatan karawo mulai dari pengirisan kain, pencabutan benang, penyulaman hingga tahap akhir. Pembukaan GKK 2026 juga akan melibatkan sekitar 100 siswa SMA Negeri 1 Limboto yang membawakan musik tradisional dengan iringan perkusi. Rute karnaval disebut masih menggunakan jalur yang sama seperti pelaksanaan 2025, sementara agenda “Gorontalo Bercerita” digelar di City Mall. Dengan tema “Ritme Hulondalo, Harmoni Warisan Gorontalo”, GKK tahun ini dirangkaikan dengan Hulonthalo Art and Craft Festival yang digelar Bank Indonesia. Sejumlah nama besar juga dijadwalkan tampil, di antaranya Yura Yunita dan



GORONTALO Karnaval Karawo tahun 2025, kembali akan digelar tahun ini. Gubernur meminta karawo lebih ditonjolkan, tidak hanya menjadi hiasan.

The Soul. Pembukaan GKK direncanakan dihadiri Menteri Pariwisata, sedangkan Menteri Komunikasi dan Digital

dijadwalkan meresmikan Desa Kreatif Wisata di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. (tro)



Gubernur Gusnar Ismail melayani warga yang berbelanja pada pasar murah yang digelar Pemprov Gorontalo di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Kamis (27/8).

Kemarau Melanda Pasar Murah Diserbu Warga

GORONTALO - Harga tujuh komoditas pangan yang dalam kondisi normal mencapai sekitar Rp271 ribu ditekan menjadi hanya Rp95 ribu dalam pasar murah bersubsidi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selisih Rp176 ribu itu ditanggung melalui subsidi pemerintah untuk menjaga daya beli warga di tengah musim kemarau. Sebanyak 2.500 paket pangan disiapkan dalam pasar murah yang digelar di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Kamis (27/8). Setiap paket berisi beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, cabai 250 gram, bawang merah 500 gram, satu

ekor ayam dan telur 10 butir. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan intervensi harga dilakukan karena kondisi kemarau berpotensi memengaruhi harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau pergerakan harga pangan. “Kami terus bekerja dan memperhatikan kondisi masyarakat apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Pemerintah terus memantau kalau ada kenaikan harga dan akan selalu hadir membantu masyarakat,” kata Gusnar. Selain paket bersubsidi, masyarakat juga bisa mendapatkan beras SPHP yang dijual Bulog

Gorontalo seharga Rp57 ribu per lima kilogram dan Minyak Kita Rp15 ribu per liter. Sejumlah komoditas lainnya turut dijual gerai modern dengan harga tingkat distributor. Pasar murah tersebut sekaligus menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan ketika tekanan harga mulai meningkat. Besarnya subsidi menunjukkan pemerintah memilih menekan harga jual langsung ke konsumen, ketimbang membiarkan kenaikan harga sepenuhnya dibebankan kepada rumah tangga. Di sisi lain, pemerintah

memastikan penyaluran bantuan beras dari Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Gorontalo mulai berjalan. Setiap keluarga penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras untuk kebutuhan tiga bulan, yakni Juli, Agustus dan September. “Saya sudah cek ke Bulog, penyalurannya sudah sementara berjalan,” ujar Gusnar. Dengan subsidi pasar murah dan distribusi bantuan beras berjalan bersamaan, pemerintah mencoba menjaga dua sisi sekaligus: harga pangan tetap terjangkau dan stok di tingkat masyarakat tetap tersedia di tengah tekanan kemarau. (tro)

CALON GUBERNUR BI

Soroti Ekonomi Indonesia yang Belum Optimal

JAKARTA - Pejabat Gubernur Sementara (Pgs) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI. Uji kelayakan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Destry merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres). Dalam proses uji kelayakan tersebut, Destry memaparkan sejumlah kondisi perekonomian nasional sekaligus strategi yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Destry, siklus ekonomi domestik saat ini masih belum mencapai kondisi yang optimal. Karena itu, masih tersedia sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Salah satu langkah yang disorot adalah penguatan fungsi intermediasi perbankan. Destry menilai perbankan nasional masih memiliki kapasitas yang dapat dioptimalkan untuk mendorong penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha. Ia menyoroti keberadaan undisbursed loan atau kredit yang sudah memiliki

komitmen namun belum ditarik oleh debitur. Nilainya disebut mencapai Rp2.548 triliun atau sekitar 21 persen dari total plafon kredit. “Siklus ekonomi kita saat ini masih berada di bawah tingkat optimalnya. Pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong, mengoptimalkan undisbursed loan yang saat ini mencapai Rp 2.548 triliun atau sekitar 21% dari plafon dan upaya penguatan daya beli masyarakat,” kata Destry. Destry juga melihat peluang untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM memiliki posisi strategis dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan daya beli. Penguatan pembiayaan bagi UMKM, lanjut Destry, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat perputaran ekonomi. Sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi penting dalam menciptakan aktivitas usaha dan menjaga konsumsi masyarakat. Ia menegaskan, menjaga stabilitas ekonomi semata belum cukup untuk menjawab berbagai tantangan perekonomian yang masih dihadapi. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mampu menciptakan ruang bagi pertumbuhan. (jp)

Seminar Nasional Kedaulatan di Garis Depan Jaga Kedaulatan, Kepala BIN Dorong Regulasi Antispionase

JAKARTA- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk menghadapi spionase dan intervensi asing. Menurutnya, ancaman tersebut nyata, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur aktivitas spionase.

Hal itu disampaikan Herindra dalam seminar nasional bertema Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang digelar ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia di salah satu hotel Jakarta, Kamis (27/8/2026). Menurut saya, Indonesia, khususnya dari kacamata keamanan, terlalu terbuka. Mungkin dari kacamata lain berbeda pandangannya. Tetapi dari apa yang saya lihat, kita terlalu terbuka, terlalu telanjang, kalau boleh

dikatakan begitu,kata Herindra.

Herindra mengatakan aktivitas intervensi asing maupun spionase bukan sekadar ancaman hipotetis. Menurut dia, pihak asing dapat memanfaatkan celah hukum dan bermain di wilayah abu-abu sehingga penindakannya menjadi sulit. Padahal menurut saya, kegiatan intervensi asing maupun spionase itu riil ada, ujanya.

Dia mengingatkan penguatan regulasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan sipil. Herindra mengakui Indonesia memiliki pengalaman masa lalu ketika intelijen pernah digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Namun, menurutnya, kondisi saat ini telah berubah seiring Indonesia menganut sistem demokrasi.Kita harus sedikit lebih tegas. Tidak perlu berlebihan, tetapi jangan terlalu baik

sampai kemudian kita berada di posisi yang dirugikan,” tutur Herindra.Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung penguatan regulasi tersebut. Dia menyebut kebutuhan aturan khusus sudah mendesak karena UU Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011 belum secara spesifik mengatur spionase.

Kalau melihat urgensinya, menurut saya memang sudah sangat harus begitu. Sudah sangat perlu sekali, karena tidak ada undang-undang di dalam yang berbicara tentang spionase, kata Nurul. Nurul menjelaskan ancaman modern telah berkembang dari spionase konvensional menjadi aktivitas siber, ekonomi, informasi, hingga operasi pengaruh. Karena itu, dia menilai pembentukan regulasi antispionase dapat memperkuat kemampuan negara mendeteksi,



Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. (foto: istimewa)

mencegah, dan menindak aktivitas intelijen asing tanpa mengorbankan kebebasan sipil. Seminar tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh antara lain Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc selaku Penasihat Senior LAB 45

dan Ardi Sutedja ,Kepala Indonesia Cyber Security Forum Selain itu, terdapat juga Adrian Panggaban selaku konsultan keuangan dan Edy Prasetyono, Direktur ASEAN Studi FISIP UI. (tro)



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga politisi Gerindra, Andre Rosiade di depan gedung DPR RI, Kamis (27/8).

Politisi Gerindra Disoraki Massa: Kita Tidak Percaya

JAKARTA - Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, disoraki massa aksi saat menyampaikan hasil audiensi terkait desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di atas mobil komando di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8).

Momen tersebut terjadi sewaktu Andre bersama Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto menemui peserta unjuk rasa usai melangsungkan pertemuan di dalam gedung parlemen.

Dalam kesempatan itu, Andre membeberkan bahwa pimpinan DPR telah menerima aspirasi publik dan menandatangani surat komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. “Teman-teman tadi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Aspirasi sudah disampaikan, dan pimpinan DPR sudah menandatangani

bahwa kalau 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri! Itu yang pertama,” ujar Andre di atas mobil komando, Kamis (27/8). Ia juga mengajak perwakilan massa aksi untuk terlibat langsung dalam memberikan masukan materi RUU bersama Komisi III DPR RI. Namun, penjelasan tersebut direspons penolakan keras oleh massa unjuk rasa. Peserta aksi mendesak agar RUU Perampasan Aset disahkan secara langsung pada hari yang sama tanpa penundaan target hingga akhir 2026. “Turun, turun. Kita nggak percaya,” teriak massa aksi di lokasi.

Merespons gejolak massa, Andre segera merampungkan keterangannya di atas mobil komando dan menegaskan kembali jaminan kepastian dari pihak dewan. “Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi, dan memastikan 15

Desember 2026 RUU Perampasan Aset sudah disahkan paling lambat,” ucapnya. Diketahui, jajaran pimpinan DPR RI dan Komisi III, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Habiburokman, serta Adies Kadir, resmi menandatangani dokumen komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset tertanggal 15 Desember 2026. Surat pernyataan tertulis itu dibacakan secara terbuka oleh Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok. Dokumen memuat klausul bahwa pimpinan DPR siap menanggalkan jabatan jika regulasi pemberantasan korupsi ini gagal diundangkan sesuai tenggat waktu. “Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam Paripurna DPR RI,” kata Botok membacakan isi surat. (jp)

BGN Segera Operasikan 2.700 SPPG Wilayah 3T

JAKARTA- Sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah rampung dibangun dan siap mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) belum mengoperasikan seluruh dapur tersebut secara serentak.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kesiapan bangunan belum otomatis membuat sebuah dapur bisa langsung beroperasi. BGN masih menyeleksi titik layanan berdasarkan kesiapan penerima manfaat, pola operasional, kondisi wilayah, hingga biaya distribusi makanan. Sekarang yang



Sudaryono

di 3T, berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang siap, artinya dapur sudah jadi,kata Sudaryono di Kemenko Pangan, Rabu (26/8).

Dari ribuan dapur tersebut, BGN akan membuka layanan secara bertahap. Papua, Maluku, dan Maluku Utara menjadi sejumlah wilayah yang diprioritaskan. Sudaryono memperkirakan terdapat sekitar 300 dapur yang akan mulai diaktifkan secara bertahap di wilayah-wilayah tersebut. Menurut dia, karakteristik geografis wilayah 3T membuat pengoperasian dapur MBG membutuhkan perhitungan

berbeda dibanding wilayah lain. Jarak distribusi, akses transportasi, serta tingginya biaya logistik, terutama di Papua, menjadi faktor yang harus diperhitungkan sebelum dapur mulai melayani penerima manfaat. Di Papua ada tingkat kemahalan. Itu kami pertimbangkan semua, ujarnya. BGN saat ini juga memilih memperkuat tata kelola dapur yang telah lebih dulu beroperasi.

Pemerintah tidak ingin perluasan jaringan SPPG justru menimbulkan persoalan administrasi maupun mengganggu penerapan standar operasional.

Sudaryono menegaskan, ekspansi MBG ke wilayah 3T akan dilakukan setelah aspek tersebut dipastikan berjalan baik. Intinya, kenapa tidak dibuka dari sekarang? Karena kami ingin memastikan tata kelolanya beres dulu,katanya. (jp)



Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji yang juga Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Perlawanan Yaqut Ditolak Hakim

Minta KPK Buktikan Penyelewengan Kuota Haji

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/8). “Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas tersebut tidak diterima,” kata Hakim Ni Kadek saat membacakan amar putusan. Majelis hakim menilai, Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara yang didakwakan kepada Yaqut. Karena itu, keberatan yang diajukan terkait kompetensi absolut pengadilan dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menghormati keputusan majelis hakim. Namun, dia menegaskan bahwa putusan sela tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya telah terbukti. Menurut Mellisa, putusan sela hanya memastikan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Berbagai hal yang tercantum dalam dakwaan, mulai dari konstruksi perkara, dugaan perbuatan Yaqut, aliran dana, hingga kerugian negara, masih harus dibuktikan melalui persidangan pokok perkara. “Tentu kami sebagai tim kuasa hukumnya Gus

Yaqut mengapresiasi, menghormati putusan apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi dalam putusan sela, di mana disampaikan untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian,” kata Mellisa sesuai persidangan. Mellisa menilai tahap pembuktian menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk menguji seluruh tuduhan yang diarahkan kepada Yaqut. Dia kembali menekankan bahwa putusan sela tidak menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

“Artinya, putusan sela ini bukanlah putusan yang membuktikan apakah terbukti atau tidak terbukti dakwaan, ya. Tidak berarti konstruksi dakwaan, alur, aliran dana, perbuatan, termasuk kerugian negara itu sudah terbukti. Ini justru awal dari pembelaan yang akan kami buktikan nanti di pokok perkara minggu depan,” tegasnya.

Dia membeberkan sejumlah poin yang sebelumnya dituangkan dalam nota perlawanan akan kembali diuji ketika sidang memasuki agenda pembuktian. Salah satunya menyangkut dasar perbuatan yang didakwakan kepada Yaqut serta dugaan aliran dana yang disebut jaksa diterima oleh kliennya. “Karena apa yang kami sampaikan di dalam nota perlawanan terkait apa perbuatan Gus Yaqut sehingga didakwa pada hari ini, kemudian apa aliran dana bagaimana yang masuk kepada beliau, apakah ini masuk ke kerugian negara atau tidak, itu nanti kami tentu mintakan nanti di dalam proses persidangan,” ucapnya. Mellisa juga meminta jaksa penuntut umum (JPU) membuktikan seluruh dakwaan dengan bukti yang jelas dan konkret. Dia mengingatkan, kewajiban pembuktian berada di tangan penuntut umum. (jp)

BPK Audit Kinerja Pariwisata Kabgor

LIMBOTO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai mengaudit kinerja penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pemeriksaan mencakup pengelolaan sektor pariwisata sepanjang 2025 hingga Semester I 2026. Audit diawali entry meeting di Ruang Upango BKAD Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8/2026). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 35 hari, hingga 29 September 2026.

BPK akan menilai sejauh mana pemerintah daerah mengelola sektor pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemanfaatan potensi wisata untuk mendukung perekonomian daerah.

Pemeriksaan tersebut menempatkan efektivitas pengelolaan sebagai salah satu titik utama. Artinya, BPK tidak hanya melihat apakah program pariwisata dijalankan, tetapi juga bagaimana hasilnya dan seberapa jauh kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah memberi dampak terhadap pengembangan sektor tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo A. Makmur menghadiri entry meeting tersebut bersama Inspektur Sri Dewi Nani, Kepala BKAD Hariyanto Manan dan sejumlah pimpinan OPD terkait. Dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, pemeriksaan dipimpin Pengendali Teknis I Erfin Effendhi dan Ketua Tim Pemeriksa Daisy Meirisa Tarigan bersama anggota tim.

Selama pemeriksaan, Pemkab Gorontalo diminta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Hasil audit nantinya menjadi dasar bagi BPK untuk menyusun rekomendasi terkait perbaikan pengelolaan sektor pariwisata.

Audit ini sekaligus akan menguji apakah kebijakan dan program kepariwisataan yang berjalan selama periode pemeriksaan telah dikelola secara efektif dan mampu mengoptimalkan potensi wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. (adv)



Entry meeting BPK RI Gorontalo, dan Pemda Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8).

(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

SOFYAN - TONNY SOLID KAWAL ANGGARAN

Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas

LIMBOTO - GP - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus terus menunjukkan kesamaan arah dalam mengawal pembangunan Kabupaten Gorontalo.

Betapa tidak, di tengah tekanan fiskal daerah, keduanya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan prioritas program dan pengelolaan anggaran.

Komitmen tersebut kembali terlihat dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2026. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8/2026), Sofyan menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi momentum untuk memastikan ruang fiskal yang tersedia digunakan secara tepat, hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Perubahan anggaran kali ini berada dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. Karena itu diperlukan ketajaman dalam menentukan prioritas,



(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, dan Wakil Bupati Tonny Yunus saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8).

kehati-hatian serta responsivitas kebijakan,” ujar Sofyan.

Kondisi fiskal tersebut ditandai dengan adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,66 miliar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,56 miliar. Namun pada saat yang sama, Dana Desa mengalami pengurangan sebesar Rp82,99 miliar. Situasi ini menuntut

pemerintah daerah melakukan penajaman agar anggaran yang tersedia tetap mampu menopang kebutuhan masyarakat dan pelayanan dasar.

Dalam arah kebijakan Sofyan dan Tonny, sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi perhatian. Di antaranya pemenuhan hak keuangan ASN dan

pemerintah desa, keberlanjutan pembangunan desa, pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem dan stuntng, hingga upaya menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Kesamaan arah tersebut juga terlihat dalam agenda pembangunan 2027. Sofyan sebelumnya menekankan agar setiap program pemerintah daerah disusun secara lebih fokus, terukur dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor ekonomi kerakyatan, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan UMKM. Di sisi lain, Tonny turut mengambil peran dalam mengawal agenda strategis pemerintahan. Dalam berbagai kegiatan, Wakil Bupati mendampingi maupun mewakili Bupati untuk memastikan agenda pembangunan berjalan dan kebutuhan daerah terus dikomunikasikan, termasuk dalam upaya memperkuat dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. (adv)

OTOMOTIF

Pakai Oli Palsu? Jangan Tunggu Mesin Bermasalah

DAW Sarankan Segera ke AHASS

MANADO - Terlanjur menggunakan oli yang diragukan keasliannya bukan berarti mesin sepeda motor langsung rusak. Namun, kondisi itu tak boleh dibiarkan. Oli sebaiknya segera dikuras dan kondisi mesin diperiksa untuk mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih serius.

PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) mengimbau pemilik sepeda motor Honda yang mengalami kondisi tersebut untuk segera memeriksakan kendaraannya di AHASS (Astra Honda Authorized Service Station).

“Jika sudah terlanjur menggunakan oli palsu, konsumen tidak perlu panik, tetapi sebaiknya segera membawa sepeda motor ke



(FOTO: DOK-DAW)

TEKNISI Sepeda motor honda pada bengkel resmi AHASS menangani sepeda motor anda dengan profesional.

AHASS. Oli lama dapat dikuras dan diganti dengan oli asli sesuai spesifikasi, kemudian kondisi mesin juga diperiksa

untuk memastikan tidak ada dampak akibat penggunaan oli tersebut,” ujar Ridwan Marpela, Technical Service

Department Head PT Daya Adicipta Wisesa.

Persoalannya bukan semata pada kualitas pelumasan. Oli

yang tidak memenuhi standar dapat membuat perlindungan terhadap komponen mesin tidak bekerja optimal. Gesekan antarkomponen pun berpotensi meningkat dan dalam penggunaan berulang dapat mempercepat keausan. Jika kondisi itu terus berlangsung, dampaknya bisa merembet pada performa kendaraan dan berujung pada biaya perbaikan yang lebih besar.

Karena itu, langkah pertama setelah menyadari oli yang digunakan bermasalah adalah tidak menunda pemeriksaan. Oli lama dikuras, kemudian diganti dengan oli yang sesuai spesifikasi kendaraan. Teknisi AHASS juga dapat memeriksa kondisi mesin untuk melihat kemungkinan dampak yang sudah terjadi.

DAW juga mengingatkan konsumen agar tidak mudah tergiur oli dengan harga jauh

di bawah harga pasaran. Selain harga, keaslian produk perlu diperiksa sebelum oli digunakan.

Untuk AHM Oil, konsumen dapat memperhatikan tanda pengaman pada kemasan, antara lain segel hologram dan kode pengaman. Keaslian produk juga dapat diperiksa melalui QR Code yang tersedia pada kemasan sesuai petunjuk yang tercantum.

Penggunaan oli yang tepat tetap perlu dibarengi perawatan berkala. Pemeriksaan rutin di AHASS memungkinkan kondisi mesin diketahui lebih awal sehingga potensi masalah dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih berat.

Intinya: kalau ragu dengan oli yang sudah terlanjur dipakai, jangan menunggu mesin bermasalah. Kuras, ganti, dan periksa. (tro)

Dekot Soroti Penerbitan PBG



Dokumentasi rapat paripurna yang digelar Dekot di Aula I.

Totok Dorong CSR BUMN Perkuat UMKM Gorontalo

GORONTALO - GP - Penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai membutuhkan dukungan lebih luas dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. Keterlibatan dunia usaha, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor perbankan, menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di tengah kebutuhan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Totok Bachtiar, mendorong optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai sumber dukungan bagi

pelaku UMKM.

Ia menilai, peran Bank Indonesia dan BUMN, khususnya sektor perbankan, sangat penting dalam memperkuat sektor UMKM, terutama dari sisi permodalan dan infrastruktur pendukung usaha. "Perlu ada peran aktif dari BUMN, terutama perbankan dan Bank Indonesia, untuk membantu pengembangan UMKM melalui dana CSR," ujar Totok. Menurutnya, pemanfaatan dana CSR dapat difokuskan pada kebutuhan riil pelaku usaha, seperti pembenahan lapak hingga penyediaan fasilitas dasar berupa kamar mandi dan WC di lokasi usaha.

Totok juga menegaskan bahwa



Totok Bachtiar

keterlibatan sektor perbankan bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan industri keuangan. Pasalnya, pertumbuhan

UMKM akan mendorong peningkatan aktivitas transaksi, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai. "Kalau UMKM berkembang, transaksi juga meningkat. Ini tentu berdampak pada sektor perbankan, sehingga sudah seharusnya mereka ikut mengambil peran," jelasnya.

Ia menambahkan, sektor UMKM memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran.

Karena itu, dukungan lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pengembangan UMKM di Kota Gorontalo dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. (Adv)

Kelayakan Lingkungan Perumahan Perlu Diperiksa

GORONTALO - GP - Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kawasan perumahan di Kota Gorontalo diminta tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis. Kelayakan lingkungan serta potensi risiko bencana di lokasi pembangunan juga perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Herman Haluti mengatakan, proses penerbitan PBG perlu melihat kondisi kawasan secara lebih menyeluruh. Pemerintah daerah harus memastikan lokasi pembangunan memang layak dan aman sebelum perumahan dikembangkan.

"Jangan hanya melihat persyaratan administrasi dan teknisnya. Kondisi lingkungan dan potensi bencana di lokasi pembangunan juga harus menjadi pertimbangan," kata Herman. Menurutnya, kelengkapan dokumen belum cukup menjadi satu-satunya dasar penerbitan izin. Pemeriksaan terhadap kondisi lahan dan lingkungan perlu dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan setelah kawasan dihuni masyarakat.

Herman mencontohkan, pembangunan perumahan di kawasan yang memiliki persoalan drainase atau berpotensi mengalami genangan dapat menimbulkan masalah baru jika aspek tersebut tidak diperhitungkan sejak awal.

"Kalau dari awal lokasi itu sudah memiliki potensi persoalan lingkungan, tentu harus diperiksa. Jangan sampai rumah sudah dibangun dan masyarakat sudah tinggal, baru kemudian muncul masalah," ujarnya. Ia juga menegaskan, proses pembangunan perumahan harus mengikuti site plan yang telah disahkan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Mulai dari proses pengesahan site plan, PBG, dan izin lainnya harus diperhatikan secara menyeluruh," tegasnya.

Menurut Herman, pengawasan sejak tahap awal jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penanganan setelah bangunan selesai dan kawasan telah dihuni. Karena itu, koordinasi antar-OPD yang



Herman Haluti

berkaitan dengan perizinan, tata ruang, lingkungan dan pembangunan perlu diperkuat.

Ia berharap proses penerbitan PBG ke depan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Pemerintah daerah perlu memastikan aspek keselamatan, kelayakan kawasan dan dampak lingkungan benar-benar menjadi pertimbangan. "PBG itu bukan hanya soal izin membangun. Ada tanggung jawab untuk memastikan bangunan dan lokasinya memang layak serta aman bagi masyarakat," katanya. Komisi II juga mendorong adanya kejelasan mekanisme pemeriksaan di lapangan. Dengan demikian, setiap rencana pembangunan perumahan dapat diketahui sejak awal apabila terdapat persoalan yang berpotensi mengganggu keselamatan penghuni maupun lingkungan sekitar. Persoalan tersebut dinilai penting seiring terus berkembangnya pembangunan kawasan perumahan di Kota Gorontalo. Pengawasan yang lemah sejak awal berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar setelah kawasan berkembang. Karena itu, kelayakan lingkungan perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam proses penerbitan PBG. Pemerintah tidak hanya memastikan dokumen lengkap, tetapi juga memastikan pembangunan sesuai dengan kondisi kawasan dan tidak meningkatkan risiko bagi masyarakat.

Herman berharap evaluasi terhadap penerbitan PBG dapat menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pembangunan perumahan di Kota Gorontalo.

"Yang kita inginkan, pembangunan perumahan ini benar-benar memberikan hunian yang layak dan aman. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung dampak karena persoalan yang seharusnya sudah diperiksa sejak awal," pungkasnya. (Adv)

Potensi PAD dari Event Belum Maksimal

GORONTALO-GP - Beragam event olahraga, hiburan dan seni budaya yang ramai dihadiri masyarakat dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo.

Anggota Komisi II Dekot Gorontalo Susanto Liputo menilai, tingginya antusiasme masyarakat pada setiap kegiatan sebenarnya menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penerimaan daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan dan pola kerja sama yang jelas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dan penyelenggara.

Menurut Susanto, setiap kegiatan yang menghadirkan banyak masyarakat perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi penerimaan yang bisa masuk ke

kas daerah sesuai ketentuan.

"Kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga maupun hiburan harus bisa dikerjasamakan dengan pemerintah melalui dinas terkait. Karena tingginya minat masyarakat yang hadir, tentu ada kontribusi yang bisa diberikan, seperti retribusi atau karcis," ujar Susanto.

Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, Pemkot sebenarnya telah memiliki perangkat melalui dinas pendapatan maupun OPD teknis. Persoalannya, implementasi dan pengawasan di lapangan dinilai masih perlu diperkuat.

Susanto melihat sejumlah event selama ini lebih banyak berorientasi pada keramaian dan dampak ekonomi jangka pendek. Sementara potensi kontribusi terhadap PAD belum dihitung dan dikelola secara optimal.

"Kalau kegiatan itu ramai dan

masyarakat banyak yang hadir, tentu ada potensi ekonomi. Pemerintah tinggal membangun pola kerja sama yang jelas dengan penyelenggara," katanya.

Ia menilai pola tersebut tidak harus memastikan kreativitas masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan. Sebaliknya, pemerintah dapat hadir sebagai mitra dengan memastikan kegiatan berjalan tertib sekaligus memberikan kontribusi sesuai aturan yang berlaku.

Selain event, Susanto juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Menurutnya, pembangunan kota membutuhkan partisipasi semua pihak.

"Sebagai masyarakat kita harus taat pajak dan retribusi. Kemajuan sebuah kota tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus

ada andil dari masyarakat," tegasnya.

Susanto juga mendorong Pemkot meningkatkan kualitas fasilitas publik, terutama sarana olahraga dan pariwisata. Fasilitas yang aman, nyaman dan representatif diyakini dapat meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.

Di sektor pariwisata, ia meminta pemerintah menghadirkan inovasi destinasi baru. Menurutnya, Kota Gorontalo membutuhkan lebih banyak pilihan tujuan wisata sehingga tidak hanya bergantung pada ikon yang selama ini sudah dikenal.

"Tadi juga disampaikan akan ada inovasi-inovasi baru dari pemerintah, termasuk kemungkinan slogan dalam rangka memacu PAD Kota Gorontalo. Kita tunggu realisasinya," pungkasnya. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

HARIAN GORONTALO POST

ANDA INGIN

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi : 0812-4470-554

GORONTALO POST

750 Honorer Kota Diberhentikan

SPORTIVO

METRO-POLES

SHOWBIZ

J&T CARGO GORONTALO 007A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI BE RADIO - 94.3 FM SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI CONTACT PERSON 0435-829392 WHATSAPP : 085256276914 INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT) VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH) SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE) SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES) SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

DATANGI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

Banggar Konsultasi Penganggaran APBD



KUNJUNGAN kerja Badan Anggaran (Banggar) Deprov Gorontalo ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

KOMISI II KUNJUNGI BONGOHULAWA

Monitoring Progres Koperasi Merah Putih

PUNCAK BOTU -GP- Komisi II Deprov Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi progres pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Kunjungan lapangan tersebut diterima oleh Pemerintah Kecamatan Tilongkabila, Pemerintah Desa Bongohulawa, serta Ketua Kopdes Merah Putih.

Dalam dialog, Ketua Kopdes

menyampaikan aspirasi terkait pembangunan gedung koperasi yang hingga saat ini belum selesai. Pekerjaan tersebut dinilai telah berlangsung cukup lama dan diharapkan segera dituntaskan agar koperasi dapat beroperasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, mengatakan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.

"Ini menjadi tugas kami untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami juga telah mengunjungi Kopdes di Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, yang pembangunannya sudah selesai. Yang penting bagaimana koperasi ini bisa segera berjalan dan beroperasi," ujar Fadli.

Menurutnya, DPRD tidak melupakan pembangunan Kopdes yang belum selesai dan akan menjadikannya sebagai catatan untuk dikonsultasikan lebih lanjut. Namun, kewenangan DPRD berada pada aspek supervisi dan pengawasan sehingga tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap proses pembangunan.

Fadli menjelaskan, keterlambatan pembangunan antara lain disebabkan adanya material dengan spesifikasi khusus yang sebagian besar harus didatangkan dari luar Gorontalo.

"Kita berharap pembangunannya bisa segera selesai. Ini tinggal persoalan waktu, sehingga Kopdes Merah Putih dapat cepat beroperasi dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya. (rmb)

PUNCAK BOTU -GP- Pimpinan Deprov bersama Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (27/8/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Deprov Thomas Mopili dan anggota Badan Anggaran. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh penjelasan dan memastikan kesesuaian proses perencanaan serta penganggaran APBD Provinsi Gorontalo dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Wakil Ketua Deprov La Ode Haimudin, menyampaikan bahwa konsultasi ini untuk memastikan tahapan atau timeline penganggaran daerah tetap berjalan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

"Dari hasil konsultasi, timeline penganggaran tidak mengalami perubahan. Kita tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar La Ode Haimudin.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah menjaga konsistensi antara setiap tahapan perencanaan hingga penganggaran. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

La Ode menegaskan, kesinambungan tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diterjemahkan secara tepat dalam penganggaran, sekaligus menghindari ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Selain aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya membangun kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, proses perencanaan dan penganggaran ke depan bisa semakin baik dan tetap sesuai dengan ketentuan," jelasnya.

Ia berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melanjutkan pembahasan APBD, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Pada akhirnya, seluruh proses penganggaran ini harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Anggaran harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo," pungkas La Ode Haimudin. (rmb)

Kunjungan
Komisi II
Deprov
Gorontalo
ke Desa
Bongohulawa,
Kecamatan
Tilongkabila,
Bone Bolango.



PENDIDIKAN

HARIAN GORONTALO POST

JUMAT, 28 AGUSTUS
TAHUN 2026

Tantangan Gawai, Pendidikan Karakter Diperkuat

SMP Negeri 1 Gorontalo Diminta Cegah Bullying di Sekolah

GORONTALO-GP- Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai di kalangan pelajar menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sekolah. Pendidikan karakter dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pembelajaran akademik, tetapi harus berjalan beriringan dengan pembentukan etika dan perilaku siswa.

Hal itu menjadi perhatian dalam peringatan HUT ke-74 SMP Negeri 1

Gorontalo, Senin (24/8). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Husin Ali meminta sekolah memperkuat pendidikan karakter di tengah semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi peserta didik. Menurut Husin, kemajuan teknologi membawa manfaat bagi proses belajar. Namun, penggunaan gawai tanpa pendampingan juga dapat memengaruhi perilaku dan pola interaksi siswa.

Karena itu, guru diminta tidak hanya mengejar capaian akademik. Peran pendidik juga penting dalam membentuk karakter, etika dan moral peserta didik.

"Peran guru tidak hanya sebatas

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter, etika, dan nilai-nilai moral anak-anak kita," ujar Husin saat mewakili Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.

Husin juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan ramah bagi seluruh siswa. Salah satu persoalan yang perlu dicegah adalah perundungan atau bullying.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang membuat siswa merasa aman untuk belajar dan berkembang. Karena itu, perilaku yang dapat merugikan atau merendahkan siswa lain perlu dicegah sejak dini.

Selain penguatan karakter, guru

juga didorong terus berinovasi dalam pembelajaran. Inovasi diperlukan agar proses belajar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik.

Husin turut meminta siswa menggunakan gawai secara bijak. Teknologi, kata dia, seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran dan kegiatan positif, bukan menjadi sarana melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

"Hindari segala bentuk perilaku negatif seperti bullying atau perundungan, serta manfaatkan teknologi dan gawai untuk hal-hal yang positif," tegasnya.

Di sisi lain, SMP Negeri 1 Gorontalo

juga diminta mempertahankan capaian akademik yang telah dibangun selama 74 tahun. Namun, prestasi tersebut perlu diimbangi dengan pembentukan siswa yang memiliki disiplin, tanggung jawab dan sikap saling menghormati.

Pemerintah Kota Gorontalo, lanjut Husin, akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sumber daya manusia serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi perubahan lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi. (Tr-76)

Fantastis!

Bola yang digunakan Diego Maradona saat mencetak gol kontroversial “Tangan Tuhan” dan “Gol Abad Ini” pada Piala Dunia 1986 terjual seharga US\$ 3,355 juta atau sekitar Rp 59,47 miliar dalam sebuah lelang. Bola Adidas Azteca tersebut digunakan dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina dan Inggris di Stadion Azteca, Mexico City, pada 22 Juni 1986. Argentina menang 2-1 berkat dua gol Maradona.

DIKUTIP dari AS, Selasa (25/8), bola tersebut dilelang Heritage Auctions setelah sebelumnya menjadi salah satu memorabilia sepak bola paling bersejarah yang berada di tangan kolektor.

Nilai penjualan US\$ 3,355 juta masih jauh di bawah perkiraan awal sekitar US\$ 10 juta. Meski demikian, Heritage Auctions menyebut penjualan itu mencetak rekor untuk memorabilia sepak bola nonjersey.

Bola tersebut memiliki nilai sejarah karena digunakan dalam dua momen berbeda yang hanya terpaut empat menit. Maradona mencetak gol pertama pada menit ke-51. Dalam duel udara dengan

kiper Inggris Peter Shilton, Maradona menggunakan tangannya untuk

menyentuh bola hingga masuk ke gawang.

Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tetap mengesahkan gol tersebut karena tidak melihat pelanggaran tangan. Teknologi video assistant referee (VAR) belum digunakan pada masa itu. Maradona kemudian menyebut gol kontroversial tersebut tercipta “sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan”. Sejak saat itu, gol tersebut dikenal luas sebagai gol “Tangan Tuhan”.

Empat menit berselang, Maradona kembali mencetak gol, tetapi kali ini dengan aksi individu yang kemudian dikenang sebagai “Gol Abad Ini”. Kapten Argentina tersebut menggiring bola melewati sejumlah pemain Inggris sebelum menaklukkan Shilton untuk membawa Argentina unggul 2-0. Inggris memperkecil ketinggalan melalui Gary Lineker pada menit ke-81, tetapi Argentina tetap mempertahankan kemenangan 2-1.

Menurut dokumen asal-

Bola Tangan Tuhan Maradona Terjual Rp 59,47 Miliar

usul barang yang disertakan dalam lelang, bola itu digunakan sepanjang pertandingan dan tidak diganti, termasuk ketika Maradona mencetak kedua gol bersejarahnya. Bola yang sama sebelumnya pernah dilelang pada 2022 dan terjual sekitar US\$ 2,37 juta. Barang tersebut kembali masuk pasar lelang sebelum akhirnya terjual dengan harga lebih tinggi pada Agustus 2026. (net)

MESKIPUN bernilai sangat fantastis, harga bola ini masih jauh di bawah jersey ini yang dikenakan mendiang Maradona dalam pertandingan yang sama. Jersey “Tangan Tuhan” tersebut telah terjual dengan harga pecahkan rekor sebesar US\$ 9,3 juta (sekitar Rp164 miliar

Giliran Legenda Sepak Bola Bersatu

Desak Giani Infantino Mundur dari Kursi Presiden FIFA

SEJUMLAH mantan pemain dan ikon sepak bola dunia bergabung dalam pernyataan bersama yang mendesak Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut muncul setelah rencana Infantino menjual sekitar 20 persen hak komersial turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta menaui penolakan luas.

UEFA, Concacaf, dan AFC disebut telah bersatu menentang rencana tersebut. Sejumlah federasi nasional seperti Inggris, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Kepulauan Faroe juga menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap Infantino. Kini, sejumlah nama besar sepak bola ikut bersuara. Mereka antara lain Robert Pires, Juan Sebastian Veron, dan Mikael Silvestre. Dalam pernyataan bersama, para ikon tersebut menyampaikan sikap tegas dengan seruan enough is enough dan menyatakan tidak ingin lagi diam. Tekanan terhadap Infantino semakin besar setelah Kevin Lamour, kolega lama sang presiden FIFA, diberhentikan. Lampour sebelumnya mengaku merasa ditipu oleh kurangnya keterbukaan Infantino. Pada saat yang sama, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia juga menarik dukungannya terhadap Infantino. Presiden UEFA

Aleksander Ceferin bahkan meminta Infantino mundur sesegera mungkin. Ia juga menyerukan kemungkinan boikot negara-negara Eropa terhadap turnamen FIFA dan menyebut

proposal komersial tersebut lebih buruk daripada proyek European Super League. Dengan semakin banyak federasi dan tokoh sepak bola yang menyuarakan penolakan, posisi Infantino sebagai Presiden FIFA kini berada di bawah tekanan yang semakin besar. Enam asosiasi sepak bola negara Nordik secara resmi menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Kepulauan Faroe menyampaikan sikap tersebut dalam pernyataan bersama setelah bertemu di Helsinki, Minggu (23/8/2026). Mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah yang sebelumnya diambil UEFA, AFC, dan CONCACAF yang telah menekan Infantino untuk mundur dari jabatannya.

“Keenam asosiasi sepak bola Nordik telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden FIFA dan prihatin dengan tata kelola serta proses pengambilan keputusan organisasi di tingkat tertinggi,” demikian isi pernyataan tersebut. (net)



Juan Sebastian Veron



Robert Pires



Mikael Silvestre



Ditengah tekanan besar dari federasi sepakbola Eropa, Presiden FIFA Gianni Infantino justru disambut baik oleh pimpinan dan perwakilan federasi sepak bola ASEAN, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

AFF Sambut Kehadiran Infantino di Final AFF (Hyundai Cup) 2026

ASEAN FOOTBALL FEDERATION (AFF) menyambut kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino, bersama pimpinan dan perwakilan federasi sepak bola ASEAN, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada leg kedua final ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8). Vietnam mempertahankan gelar juara AFF setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand pada leg kedua. Berkat kemenangan 2-0 pada leg pertama di Bangkok (Sabtu, 22/8), Vietnam unggul dengan skor agregat 4-2. Menurut AFF, kehadiran para pemimpin sepak bola kawasan menegaskan bahwa final AFF bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga simbol persatuan, persahabatan, dan diplomasi sepak bola ASEAN. Pertandingan tersebut mempertemukan pemain, pelatih, federasi, suporter, dan masyarakat dalam semangat sportivitas serta persaudaraan, dengan rivalitas di lapangan berjalan berdampingan dengan hubungan baik antarnegara. Dalam kunjungannya, Gianni Infantino juga bertemu dengan Presiden Vietnam To Lam. Pertemuan ini dinilai menunjukkan peran sepak bola sebagai jembatan untuk memperkuat dialog,

membangun kerja sama, dan mempererat hubungan regional.

“Kehadiran Presiden Gianni di Vietnam bersama para pemimpin dan perwakilan federasi sepak bola ASEAN merupakan sebuah kehormatan bagi AFF. Ini menunjukkan final AFF bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang bagaimana sepak bola mampu menyatukan ASEAN dalam semangat persahabatan, rasa hormat, dan visi bersama,” ujar Presiden AFF Khiev Sameth.

AFF menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sepak bola ASEAN melalui kerja sama antarfederasi, pembinaan talenta, peningkatan kualitas kompetisi, serta pembangunan ekosistem yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat ASEAN, sepak bola diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi generasi mendatang dan menjadi kekuatan yang menyatukan kawasan. Final AFF 2026 menjadi bagian dari perjalanan ASEAN untuk tumbuh bersama melalui sepak bola. Bukan sekadar menentukan juara, melainkan memperkuat persahabatan dan membangun masa depan kawasan. (net)

Warga Bonepantai Tolak Perusahaan Tambang

Demo ke Kantor Camat, Desak Penghentian Aktivitas Penambangan

BONE BOLANGO, GORONTALO GP Penolakan terhadap aktivitas PT Celebes Bone Mineral (CBM) kembali mencuat di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kecamatan Bonepantai menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Kecamatan Bonepantai, Kamis (27/8/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita tersebut dikoordinatori Abdul Rahmat Husain. Massa membawa sejumlah poster dan spanduk penolakan serta menggunakan pengeras suara dalam menyampaikan aspirasi. Dalam aksinya, massa mendesak penghentian seluruh aktivitas maupun dukungan dari para kepala desa di Kecamatan Bonepantai terhadap kegiatan PT CBM.

Massa juga meminta Pemerintah Daerah dan instansi berwenang memeriksa serta menindak tegas oknum aparat sipil negara (ASN), dalam hal ini Sekcam Bonepantai, yang diduga terlibat atau membekingi aktivitas pertambangan sehingga dinilai memicu keresahan masyarakat. Selain itu, massa meminta Camat Bonepantai merekomendasikan pemindahan tugas Sekcam Bonepantai ke kecamatan lain guna meredakan gejolak sosial dan menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut. Massa kemudian diterima langsung oleh Camat Bonepantai bersama Kasi

Ekbang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kecamatan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Camat Bonepantai bahkan menyatakan sikap tegas terkait keberadaan PT CBM di wilayahnya. Saya atas nama pribadi dan pemerintah menyatakan diri akan menolak bersama masyarakat terhadap segala bentuk aktivitas PT CBM di wilayah Kecamatan Bonepantai, meskipun taruhannya adalah jabatan saya. Ini semua demi tanah kelahiran saya dan kepentingan masyarakat saya, tegasnya. Ia juga memastikan Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa tidak akan memfasilitasi kegiatan PT CBM di Bonepantai. Kami Pemerintah Kecamatan maupun Desa menyatakan sikap bahwa kami tidak akan memfasilitasi segala bentuk kegiatan CBM di Kecamatan Bonepantai, walaupun taruhannya adalah jabatan saya,ujarnya. Terkait persoalan Sekcam Bonepantai, Camat menyatakan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu perpecahan. Sementara itu, Kapolsek Bonepantai AKP Eldo A.S. Rawung, SH., mengatakan pihak kepolisian berhasil mengamankan jalannya aksi sehingga berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman tanpa mengganggu ketertiban umum. Kami berhasil mengamankan pelaksanaan unjuk rasa ini sehingga berjalan kondusif dan aman, tanpa insiden sedikit pun,ujar AKP Eldo. Di akhir kegiatan, Pemerintah Kecamatan dan



AKSI unjuk rasa damai terkait Penolakan terhadap aktivitas PT Celebes Bone Mineral (CBM) di Kantor Kecamatan Bonepantai, Kamis (27/8/2026).

Usut Judol, 273 HP Personel Samapta Dirazia

GORONTALO - GP- Sebanyak 273 telepon seluler atau handphone (HP) milik personel Direktorat Samapta Polda Gorontalo dirazia Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Kamis (27/8/2026). Razia bertujuan memastikan apakah ada transaksi Judi Online (Judol) di HP maupun penggunaan aplikasi pinjaman online

(pinjol).Paur Binplin Subdit Provos Bidpropam Polda Gorontalo, Iptu Jamal Yakob, bersama Satgas Judol dan Pinjol melakukan pemeriksaan secara bergantian. Setiap telepon seluler personel diperiksa untuk memastikan tidak terdapat aplikasi maupun indikasi aktivitas yang berkaitan dengan judi online. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan adanya indikasi personel Dit Samapta yang terlibat judi online. Iptu Jamal mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal yang dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. â€œIni merupakan langkah pencegahan dan pengawasan terhadap personel. Kami tidak ingin ada anggota yang terlibat judi online maupun aktivitas lain yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi,â€ tandas Iptu Jamal.

Hal yang sama dilakukan Propam Polres Bone Bolango melaksanakan kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel Polres Bone Bolango. Kegiatan tersebut turut disertai dengan pemeriksaan handphone masing-masing personel guna memastikan tidak adanya aktivitas yang berkaitan dengan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. (roy)



Ratusan HP milik personel Dit Samapta Polda Gorontalo dirazia Provost untuk mengusut apakah ada transaksi Judol.

Motif IRT Ditikam 15 Tusukan Tersangka Cemburu Istrinya Diduga "Bahugel"

GORONTALO - GP - Penyidik Reskrim Polres Gorontalo Kota akhirnya mengungkap motif dibalik penikaman hingga 15 tusukan kepada seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial SM (21). Ternyata, korban diduga 'Bahugel' atau selingkuh dengan Pria IDaman Lain (PIL). Puncaknya, hari perpisahan, korban menolak ajakan suaminya sendiri, FM (26) untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Peristiwa penikaman ini terjadi di sebuah kamar kos di Jalan Gelatik, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Sabtu (22/8) sekitar pukul 13.05 WITA. Setelah melakukan penyerangan, FM kemudian mendatangi Polresta Gorontalo Kota dan menyerahkan diri kepada polisi. Pelaku turut membawa senjata tajam yang digunakan dalam aksi tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kopol Akmal Novian

Reza, dalam konferensi pers yang disampaikan atas nama Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol. Muhammad Junaeddy Johnny, menjelaskan, bahwa perkara tersebut bermula ketika korban dan tersangka bertemu di kamar kos. Menurut Akmal, kedatangan FM awalnya untuk membicarakan persoalan rumah tangga dengan istrinya. Keduanya kemudian duduk berhadapan di atas kasur, tersangka disebut sempat meminta korban untuk melakukan hubungan badan sebelum keduanya berpisah. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh korban. Penolakan tersebut kemudian memicu emosi FM. Polisi menyebut kemarahan tersangka juga berkaitan dengan rasa cemburu setelah sebelumnya melihat istrinya bersama pria lain di tempat karaoke serta berboncengan dengan laki-laki lain.

Dalam kondisi emosi, FM

mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam lemari pakaian. Senjata tajam tersebut kemudian digunakan untuk menyerang korban yang saat itu masih berada di atas kasur.

Akmal mengungkapkan, serangan pertama diarahkan ke bagian perut korban. Tidak berhenti pada satu serangan, FM kembali menusukkan dan menyayat tubuh istrinya hingga korban mengalami sebanyak 15 luka. Teriakan korban yang terdengar dari dalam kamar membuat keluarga mengetahui kejadian tersebut. Pintu kamar kemudian didobrak dan setelah itu FM meninggalkan lokasi.

Alih-alih melarikan diri jauh, tersangka justru mendatangi Polresta Gorontalo Kota untuk menyerahkan diri. Dalam proses tersebut, FM juga membawa barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat melakukan penyerangan. "Tersangka dijerat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau subsidi Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda paling banyak Rp50 juta," tutup Akmal.(tha)



Pelaku kekerasan terhadap istrinya di amakan Polresta Gorontalo Kota. Foto: Natharahman/Gorontalo



SENSUS EKONOMI 2026

15 Juni - 31 Agustus 2026

Setiap Jawaban Anda, Menentukan Masa Depan Bangsa



Ingat TIR !

- ✓ **T**erima Petugas SE2026
- ✓ **I**si Data dengan Benar
- ✓ **R**ahasia Terjaga

Call Center: 0815-1126-2026

Menjadi Polisi Rakyat

POLRI hari ini terus bertransformasi dalam menjalankan perannya di tengah berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran kepolisian di tengah rakyat memiliki dimensi yang semakin luas dan berdampak.

Di samping menjalankan tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum, Polri juga hadir dalam berbagai program strategis pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, pemenuhan gizi, pembangunan infrastruktur, hingga kegiatan sosial lainnya.

Keterlibatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman, tertib, dan produktif.

WAJAH SOSIAL POLRI

Salah satu gambaran nyata dari peran sosial Polri terlihat dalam pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi. Jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa. Kehadiran jembatan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi jalan yang membuka akses sosial ekonomi, serta sarana mobilitas masyarakat.

Semangat untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat juga tercermin melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, sebuah program pengabdian dan aksi sosial yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Kegiatan ini diarahkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses.

Peran Polri dalam isu sosial juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi yang berhasil membangun 1.415 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada Februari 2026, Presiden memberikan penghargaan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan

ketahanan pangan nasional.

Presiden juga memberikan apresiasi atas capaian Polri dalam menjaga keamanan nasional, termasuk keberhasilan mempertahankan kondisi tanpa insiden terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut tidak terlepas dari kemampuan deteksi dini, pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan berbagai lembaga. Berbagai peran tersebut menunjukkan semakin kuatnya wajah sosial Polri di tengah masyarakat.

Kendati demikian, perluasan peran sosial tersebut juga perlu dilihat lebih dalam. Semakin luas ruang kehadiran Polri di tengah masyarakat, semakin penting pula memastikan batas kewenangan, profesionalitas, dan akuntabilitas tetap terjaga. Keterlibatan dalam berbagai program sosial tidak boleh membuat fungsi utama Polri sebagai penegak hukum menjadi kabur.

Kehadiran dalam program pemerintah harus tetap ditempatkan dalam kerangka tugas dan kewenangan kepolisian. Justru di sini tantangannya. Bagaimana Polri dapat hadir dalam berbagai persoalan masyarakat tanpa kehilangan identitas, tugas, dan fungsinya. Kemampuan menjaga keseimbangan antarpendekatan preventif, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum menjadi penting agar perluasan peran tersebut tidak sekadar menghasilkan banyak aktivitas, tetapi benar-benar menghasilkan rasa aman dan kepercayaan publik.

POLISI RAKYAT

Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menegaskan bahwa Polri harus menjadi polisi rakyat. Dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, pada 29 Oktober 2025, Presiden menegaskan bahwa polisi harus menjadi mata dan telinga rakyat. Pesan tersebut merupakan ajakan agar seluruh jajaran Polri semakin dekat dengan masyarakat, membangun komunikasi yang terbuka,



Oleh :
Endang Tirtana

serta menciptakan hubungan timbal balik antara kepolisian dan rakyat.

Mata dan telinga perlu lebih peka dalam mendengar keluhan, kegelisahan, dan kebutuhan masyarakat, agar Polri mampu memitigasi dan merespons secara tepat, adil, profesional, dan bertanggung jawab.

Arahan Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan pendekatan community policing yang menempatkan polisi sebagai bagian dari komunitas, dan mendorong kepolisian untuk secara aktif membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan keamanan.

Polisi tidak hanya bertindak ketika gangguan keamanan, tetapi juga bekerja secara proaktif untuk memahami akar persoalan dan mencegahnya berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Dalam pendekatan community policing, masyarakat bukan objek pelayanan, melainkan mitra dalam proses pemecahan masalah. Polisi bersama masyarakat perlu mengidentifikasi persoalan, memahami penyebabnya, menentukan langkah penanganan, hingga mengevaluasi hasilnya. Karena

itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan polisi membangun hubungan yang produktif, terbuka, dan saling percaya dengan masyarakat. Gagasan tersebut juga memiliki hubungan yang kuat dengan Prinsip Peelian, yang berakar pada pemikiran Sir Robert Peel, tokoh yang mendirikan Metropolitan Police London pada 1829 dan dikenal sebagai salah satu peletak dasar kepolisian modern. Prinsip-prinsip yang secara tradisional dikaitkan dengan Peel menempatkan pencegahan kejahatan, kepercayaan masyarakat, dan akuntabilitas sebagai fondasi penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Salah satu gagasan yang sering dikaitkan dengan Prinsip Peelian adalah bahwa efektivitas polisi tidak semata-mata diukur dari jumlah penangkapan atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, tetapi dari kemampuan polisi mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Cara pandang ini penting karena menggeser orientasi kepolisian dari pendekatan yang reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan berbasis pemecahan masalah. Oleh konteks itu, keterlibatan Polri dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah juga perlu ditempatkan dalam koridor tersebut, supaya kehadiran Polri dapat membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Dalam perspektif ini, Prinsip Peelian menempatkan hubungan polisi dan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Prinsip Peelian menyebut polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi, bahwa polisi bukan institusi yang berdiri di luar masyarakat, melainkan bagian dari masyarakat yang memperoleh mandat untuk menjaga keamanan bersama.

Karena itu, pesan Presiden bahwa polisi harus menjadi polisi rakyat sesungguhnya merupakan dorongan kuat agar Polri mengakselerasi menjadi kepolisian modern. Pesan tersebut perlu

diterjemahkan menjadi haluan bersama dalam membangun budaya organisasi Polri. Tantangannya adalah memastikan semangat polisi rakyat benar-benar menjadi bagian dari budaya organisasi. Polri perlu terus memperkuat kualitas pelayanan, kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kapasitas personel di lapangan, kerja sama dengan masyarakat, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan. Kedekatan dengan rakyat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran fisik, tetapi harus diterjemahkan menjadi kemampuan mendengar, memahami, merespons, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dihadapan publik, dinamika perubahan sosial, geopolitik dan geoekonomi berlangsung dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, tantangan keamanan mempunyai banyak wajah dan bersifat kompleks. Persoalan sosial, konflik masyarakat, disinformasi, ancaman digital, hingga persoalan ekonomi dan lingkungan dapat berkembang menjadi sumber kerawanan apabila tidak dikelola sejak dini. Karena itu, polisi membutuhkan masyarakat sebagaimana masyarakat membutuhkan polisi.

Oleh sebab itu, yang paling penting bagi Polri adalah bagaimana kepercayaan menjadi pondasi dan pijakan agar seluruh langkah strategis Polri dapat bersinergi dengan masyarakat. Sebab, kepercayaan lahir dari konsistensi pelayanan, keteladanan, profesionalisme, transparansi, dan kesediaan untuk dikritik serta diawasi. Polisi rakyat bukan berarti polisi yang selalu dipuji rakyat, karena polisi rakyat adalah polisi yang kuat untuk menerima kritik, profesional untuk memperbaiki diri, dan memahami bahwa menjadi polisi sesungguhnya adalah amanah rakyat. (*)

Penulis adalah wakil ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah

Nyanyian Debu di Bawah Langit Az-Zariyat

“All we are is dust in the wind.”

KALIMAT itu telah berpuluh-puluh tahun bergema dari sebuah lagu yang ditulis Kerry Livgren, personel grup rock Kansas. Bagi sebagian orang, ia hanyalah lirik puitis tentang kefanaan hidup.

Bagi sebagian yang lain, ia adalah pengingat bahwa seluruh ambisi manusia, sebesar apa pun, pada akhirnya akan kembali menjadi debu.

Jauh berabad-abad sebelum lagu itu lahir, Al-Qur'an telah membuka Surat Az-Zariyat dengan sumpah-sumpah yang agung: “Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, demi awan yang mengandung hujan, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan demi (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.” (QS. Az-Zariyat: 1â€“6).

Lalu disusul peringatan yang terasa begitu dekat dengan kehidupan manusia modern: “Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.” (QS. Az-Zariyat: 8).

Betapa menariknya dua sumber yang lahir dari dunia yang sangat berbeda itu bertemu pada satu titik yang sama: manusia bukan pusat alam semesta. Kita hanyalah bagian yang sangat kecil dari ciptaan-Nya.

Barangkali memang kita tidak lebih dari debu yang beterbangan di dalam angin. Debu tidak pernah memilih ke mana ia akan diterbangkan. Anginlah yang menentukan arahnya. Debu tidak

memiliki kuasa untuk menetapkan tempatnya berakhir. Ia hanya bergerak mengikuti kehendak yang lebih besar daripada dirinya.

Begitu pula manusia. Namun anehnya, justru makhluk yang begitu kecil ini sering merasa dirinya paling besar. Kita membangun gedung-gedung tinggi seolah ingin menyaingi langit. Kita mengumpulkan harta seakan usia tidak memiliki batas. Kita berebut jabatan seolah kursi kekuasaan mampu mengalahkan kematian.

Di ruang sosial hari ini, manusia lebih sibuk membangun citra daripada membangun makna. Media sosial dipenuhi perlombaan untuk terlihat berhasil. Yang dipamerkan bukan lagi karya, melainkan kemasan.

Nilai seseorang semakin sering diukur dari jumlah pengikut, tanda suka, atau berapa kali namanya menjadi perbincangan. Ironisnya, semua itu berlangsung di atas fondasi yang sangat rapuh. Debu. Di dunia politik, perbedaan pendapat yang disebut Al-Qur'an terasa semakin nyata. Ayat “sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat” seperti sedang menggambarkan ruang publik kita hari ini. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekayaan demokrasi, melainkan alasan untuk saling meniadakan.

Yang dicari bukan lagi kebenaran, tetapi kemenangan. Fakta sering dikalahkan oleh narasi. Data dikalahkan oleh emosi. Kebisingan dianggap lebih penting daripada kebijaksanaan. Semakin keras seseorang berteriak, semakin dianggap



Oleh :
Ahmad Sihabudin

benar.

Padahal angin tidak pernah berteriak. Ia hanya bertiup, tetapi mampu memindahkan gunung pasir. Dalam kehidupan ekonomi pun demikian. Kita hidup di zaman ketika angka sering dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan.

Pertumbuhan dipuja, keuntungan dikejar, konsumsi dirayakan. Seolah-olah manusia lahir hanya untuk membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkannya.

Kita lupa bahwa liang kubur tidak pernah bertanya berapa saldo rekening seseorang. Ia hanya menerima tubuh yang telah kembali menjadi tanah. Di tengah hiruk-pikuk itu, waktu diam-diam bekerja. Ia tidak pernah tergesa, tetapi tidak pernah terlambat. Setiap detik yang

berlalu tidak dapat dipanggil kembali. Setiap menit membawa kita semakin dekat kepada garis akhir yang tidak pernah diketahui tanggalnya.

Mungkin inilah makna paling dalam dari lirik Dust in the Wind. Yang hilang bukan hanya tubuh manusia, tetapi juga kesempatan yang disia-siakan. Kita sering mengira masih ada hari esok untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, mengunjungi orang tua, memeluk anak, menolong sesama, atau berbuat baik.

Padahal angin tidak pernah memberi tahu kapan ia akan berhenti berembus. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika manusia mulai kehilangan rasa kecil di hadapan Tuhan. Kemajuan teknologi membuat kita merasa mampu mengendalikan hampir segala sesuatu. Kecerdasan buatan, komputasi, rekayasa genetika, dan berbagai inovasi menghadirkan kesan bahwa manusia dapat menguasai masa depan.

Namun satu virus kecil pernah menghentikan dunia. Satu gempa mampu merobohkan kota. Satu banjir dapat melumpuhkan peradaban. Satu hembusan angin dapat mengingatkan kita betapa rapuhnya semua yang kita banggakan. Maka mungkin bukan kebetulan jika Surat Az-Zariyat dibuka dengan angin.

Angin adalah simbol kekuasaan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ia tidak memiliki bentuk, namun mampu mengubah bentuk segala sesuatu. Ia tidak dapat digenggam, tetapi dapat merobohkan bangunan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sering bekerja tanpa suara. Begitu pula

kehendak Allah. Pada akhirnya, yang akan ditanyakan bukanlah seberapa terkenal kita, melainkan seberapa bermanfaat kita. Bukan seberapa banyak orang mengenal nama kita, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan.

Bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita mengisi kehidupan itu. Karena waktu bukan sekadar hitungan jam. Ia adalah amanah. Setiap detik adalah kesaksian. Setiap menit adalah catatan. Setiap keputusan adalah jejak yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Kita memang hanyalah debu di dalam angin. Namun justru karena hidup ini sesingkat hembusan angin, setiap kebaikan menjadi sangat berharga.

Debu tidak dapat memilih kapan ia akan jatuh. Tetapi manusia masih diberi kesempatan memilih bagaimana ia akan hidup sebelum akhirnya kembali kepada tanah. Dan mungkin, di situlah letak kemuliaan manusia. Bukan pada besarnya kuasa yang dimiliki.

Melainkan pada kesadarannya bahwa seluruh kuasa itu hanyalah titipan. Ketika angin berhenti bertiup, semua akan kembali kepada asalnya. Yang tertinggal bukanlah tepuk tangan. Bukan pula jabatan. Bukan kekayaan. Yang tertinggal hanyalah amal, dan jejak-jejak kebaikan yang pernah kita tanam sebelum kita benar-benar menjadi debu yang diterbangkan angin. (*)

Penulis dalah Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

■ DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pormalingo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode,
Sekretaris Redaksi/HRD: Chicilia Noviaastuti Arifin. **IT**: Luki

■ DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

■ DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.
Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

■ LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

■ ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.



SUASANA rapat paripurna belum lama ini yang disimak serius jajaran aleg.

(FOTO DOK)

Daya Saing Daerah Lebih Ditingkatkan

TI LONGKABILA -GP- Pemerintah daerah Bone Bolango tengah berupaya menata pembangunan. Kebijakan itu tentunya tak luput dari progres pembangunan yang sudah diletakkan lalu. Selaras dengan itu maka ketua Faisal Yunus belum lama ini mendorong pemerintah agar kedepannya mampu meningkatkan daya saingnya dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo bahkan diluar provinsi.

Persaingan ini dapat berupa persentase ekonomi, menepis wilayah terisolir hingga capaian pendapatan diatas rata-rata bagi warga. Begitu juga menuntaskan angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat.

Selain itu banyak kebutuhan rakyat yang masih perlu dituntaskan kedepan. Baik itu dari segi ekonomi, layanan sektor perikanan, pertanian, kesehatan dan pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran kedua lembaga sesuai kewenangan dimiliki dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintah yang kuat. "Maka kemitraan dua lembaga penyelenggara pemerintahan yakni eksekutif dan legislatif harus dibangun dengan baik, supaya saling mendukung meningkatkan daya saing daerah "Supportnya belum lama ini. (csr)

Jalankan Amanah dengan Kerja Keras dan Cerdas

Bentuk Komitmen Terhadap Tugas dan Tanggungjawab

TI LONGKABILA -GP- Prinsip kerja keras, sehat dan cerdas diharapkan mampu menjadi sebuah spirit bekerja para aleg didalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya yang telah diamanahkan oleh rakyat. Ini yang selalu diserukan ketua DPRD Bonbol Faisal Yunus. Dimana

Faisal menegaskan sejatinya tugas dan tanggungjawab yang dipegang wakil rakyat adalah bentuk amanah yang dipercayakan rakyat. Tentu pada saat menyerahkan amanah tersebut, rakyat memiliki harapan agar para wakil rakyat yang dipilihnya tersebut mampu mengawal, menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan itu tentu butuh ditempuh dengan kerja keras dan kerja cerdas sembari berkomitmen untuk

tetap membangun kerjasama bersama pemerintah. Hal itu juga perlu ditunjukan lewat citra dan kinerja." Dengan harapan mampu membawa aspirasi karena harapan masyarakat itu hanya mampu diwujudkan dengan kerja sehat dan cerdas serta bekerjasama dengan pihak eksekutif.

Harapan peningkatan dari sisi kualitas lembaga juga harus ditunjukan dengan citra dan kinerja. Harus mulai kerja keras dan kerja cerdas," serunya belum lama ini. (csr)

Pembangunan Daerah Lebih Maju Sangat Diidamkan

TI LONGKABILA - GP- Upaya serius menciptakan pembangunan daerah ke arah lebih maju patut ditanamkan seluruh pihak. Ini penting sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah. Aleg Zulkarnain Ruchban belum lama ini mensupportnya supaya setiap pihak

memiliki rasa ingin membangun daerah. Sebab ketika semua peduli maka menurutnya segala bentuk keinginan untuk membangun berpeluang dilakukan semua pihak untuk ikut berpartisipasi demi kemajuan daerah.

Kepedulian pembangunan daerah itulah yang tentunya diyakini akan ikut memberi

optimal terhadap kualitas dan kuantitas pembangunan, yang mengedepankan pelaksanaan yang bertanggungjawab dan profesional. "Pembangunan daerah harus kita support tentunya dengan kepedulian dan kesadaran bersama, "Supportnya belum lama ini. (csr)

Pesan PSI untuk Ketum Projo Budi Arie Tegass

WAKIL Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan anggota, pengurus, ataupun Sekretaris Jenderal DPP PSI. Untuk itu, Budi Arie diminta untuk berhenti menyeret nama partai berlambang gajah itu. Hal itu berkaitan dengan pernyataan Budi Arie mengenai percepatan pemilu sebelum tahun 2029 viral di media sosial.

"Kami tegaskan Budi Arie bukan

bagian dari PSI, titik. Karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie," ucap Budiman saat dihubungi JPNN. com, pada Kamis (27/8). Menurut dia, mengaitkan tindakan maupun pernyataan Budi Arie dengan PSI adalah tidak berdasar dan menyesatkan. "Apa pun yang dilakukan atau dikatakan Budi Arie adalah tanggung jawab Budi Arie

sendiri. Dia tidak mewakili PSI, dia bukan PSI," tegas Andy.

Andy meminta semua pihak menghentikan spekulasi mengenai posisi Budi Arie di PSI karena eks Menteri Koperasi itu bukanlah anggota atau kader PSI. "Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan Sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI," jelasnya. Sebelumnya, Budi Arie

mengungkapkan insting politiknya terkait situasi politik tanah air, terkhusus pemilu.

Hal itu diketahui dari sebuah video yang viral di social media atau sosmed, seperti yang dibagikan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam Instagram akun @dennyindrayana99. Budi Arie tampak berbicara soal percepatan pemilu dalam sebuah dialog yang juga dihadiri Presiden ketujuh RI

Joko Widodo (Jokowi). Budi bahkan mengaku sudah membisikkan kepada Jokowi terkait potensi percepatan pemilu agar bisa mempersiapkan diri. "Pak, kok, insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" kata Budi Arie membahas dialognya dengan Jokowi. (jpnn)



PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DIPERKUAT

Pemkot Perkuat Sinergi Lintas Lembaga



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel didampingi Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo, Dandy Datau ketika akan membuka turnamen sepak bola Persital Tulumolo Cup 2026, Rabu (26/8/2026) malam.

Persital Tulumolo Cup 2026 Resmi Bergulir

Wawali Indra Ingatkan Sportivitas

GORONTALO - GP - Persital Tulumolo Cup 2026 resmi dimulai di Lapangan Ampu, Kelurahan Tulumolo, Kota Gorontalo. Kompetisi sepak bola ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2026.

Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, turut hadir dalam pembukaan turnamen yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) tersebut.

Ia memberikan apresiasi kepada panitia, pengurus Persital, pemerintah kecamatan, serta masyarakat Tulumolo yang telah berkolaborasi menghadirkan kompetisi olahraga di tingkat kelurahan.

Menurut Indra, keberadaan turnamen seperti Persital Tulumolo Cup memiliki makna lebih luas dari sekadar perebutan gelar juara. Kompetisi dapat menjadi ruang membangun kebersamaan, mempererat silaturahmi, sekaligus membuka kesempatan bagi para pemain muda untuk mengembangkan



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika memberikan sambutan pada kegiatan pembukaan turnamen sepak bola Persital Tulumolo Cup 2026, Rabu (26/8/2026) malam.

bakatnya. "Atas nama Pemerintah Kota Gorontalo, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana, pengurus Persital, pemerintah kecamatan dan seluruh masyarakat Tulumolo," ujar Indra.

Ia meminta seluruh tim tampil maksimal sepanjang kompetisi. Namun, ambisi meraih kemenangan tidak boleh membuat pemain mengabaikan

nilai-nilai sportivitas.

"Kemenangan memang menjadi tujuan dalam pertandingan. Namun kejujuran, rasa saling menghormati dan kebersamaan jauh lebih utama," tegasnya.

Indra juga menaruh perhatian pada perangkat pertandingan. Ia meminta wasit menjalankan tugas secara profesional, objektif dan adil agar setiap laga berlangsung dalam suasana

kompetitif namun tetap sehat.

Tak hanya kepada pemain dan wasit, pesan serupa disampaikan kepada masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Penonton diharapkan turut menjaga keamanan, ketertiban serta kebersihan di sekitar lokasi pertandingan. Indra berharap Persital Tulumolo Cup mampu menjadi ajang pembinaan sekaligus memberikan pengalaman bagi para pemain, khususnya generasi muda.

"Bertandinglelah dengan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Tampilkan permainan terbaik, hibur masyarakat dengan aksi-aksi yang memukau, serta jadikan ajang ini sebagai sarana mengasah kemampuan dan menambah pengalaman," katanya. Dengan dibukanya Persital Tulumolo Cup 2026, Indra berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman dan lancar hingga babak final. Semangat persaingan, kata dia, harus tetap berjalan beriringan dengan nilai persaudaraan antarpeserta. (adv)

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memantau perkembangan aliran kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, se usai mengikuti rapat pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bersama unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) pada Kamis (27/8/2026).

Indra menilai, pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Pertukaran informasi dan koordinasi secara berkala dinilai penting agar setiap perkembangan di tengah masyarakat dapat diketahui secara lebih cepat dan ditangani sesuai ketentuan.

"Bagaimana kita bersinergi antara Kejaksaan, pemerintah kota, Kepolisian, BIN, semuanya untuk menjaga Kota Gorontalo ini tetap pada track-nya," kata Indra.

Menurutnya, kondisi Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemantauan sejauh ini masih relatif aman dan kondusif. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

Indra meminta komunikasi antar lembaga terus diperkuat, terutama dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan, informasi yang diterima harus diklarifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

"Saling tukar informasi antar lembaga vertikal ini harus tetap kita sering-sering adakan," ujarnya. (adv)



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, ketika mengikuti rapat pengawasan aliran kepercayaan masyarakat bersama unsur Kejaksaan, Kepolisian dan BIN, Kamis (27/8/2026).

POSISI KAS DAERAH PER 26 AGUSTUS 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 25 Agustus 2026	80.143.056.376,96
	Penerimaan Kas Daerah per 26 Agustus 2026	1.596.830.771,76
	Pengeluaran Kas Daerah per 26 Agustus 2026	598.333.382,00
II	Saldo Akhir per 26 Agustus 2026	81.141.553.766,72

Gorontalo, 27 Agustus 2026

PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH



100% Kualitas Honda

Honda Genuine Parts

Suku Cadang Asli Motor Honda

AWET AMAN IRIT PRESISI

SUKU CADANG **ASLI** DARI YANG **AHLI**

Informasi : Scan Me

